

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DAN PENDIDIKAN MULTIAGAMA MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH

**Oleh:
Yudi Setianto**

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar di dunia dengan segala keunikannya. Keunikan tersebut antara lain bahwa bangsa ini secara geografis terdiri dari ribuan pulau. Ribuan pulau tersebut terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, golongan, budaya, adat, dan agama. Perbedaan ini adalah keunikan, yang mempunyai banyak hal sisi positif sekaligus sebaliknya. Selama ini, Bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai spirit mempersatu di antara berbagai kebhinekaan dan keberagaman. Kebhinekaan bangsa ini sebagai fakta historis yang tidak dapat disangkal. Meskipun demikian sampai saat ini, secara empiris kebhinekaan tersebut terkadang disangkal dengan adanya konflik sosial secara vertikal dan horisontal. Konflik sosial tersebut sering dilatarbelakangi oleh kebhinekaan tersebut. Berbagai konflik di Indonesia dari jaman dahulu sampai yang kekinian, sering kali berakar dari permasalahan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan). Padahal, Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas dengan keunikan keberagamannya tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan dan dicari solusinya, maka permasalahan sejenis akan berulang dengan waktu dan tempat yang berbeda.

Salah satu solusi menghadapi permasalahan yang dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan dalam elemen suatu bangsa tersebut adalah melalui dunia pendidikan, khususnya melalui pendekatan pembelajaran sejarah. Namun selama ini, pendidikan sejarah di Indonesia dianggap oleh sebagian kalangan mengalami krisis dalam pembentukan karakter dan sejenisnya. Maka untuk itu, perlu adanya terobosan yang *out of the box* dalam menghadapi potensi permasalahan laten seperti permasalahan dimaksud yang terkadang sulit diduga, kapan dan dimana terjadi.

Dalam rangka mengkaitkan nilai-nilai pembelajaran sejarah dengan permasalahan krusial dan berulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara tentang multi kultural, multi agama, serta spirit toleransi yang dapat dilalui melalui

pengintegrasian materi sejarah dan juga model pembelajaran sejarah yang dikaitkan dengan permasalahan yang dimaksud.

Kajian dari artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan ide dan gagasan, agar terdapat materi pembelajaran sejarah yang dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dalam hal multi kultural dan multi agama. Tujuan utama kajian ini untuk menggambarkan pengintegrasian nilai-nilai multi kultural dan multi agama dalam pembelajaran sejarah, agar peserta didik mempunyai kesadaran bahwa bangsa Indonesia secara historis disatukan oleh perbedaan-perbedaan yang sangat kompleks. Dari deskripsi analisis yang dimaksud, terdiri tiga kajian yakni: Pertama, munculnya kesadaran multi kultural pada peserta didik. Kedua, munculnya kesadaran multi agama kepada peserta didik. Ketiga, pengintegrasian materi multi kultral dan multi agama melalui pembelajaran sejarah tematik.

PEMBAHASAN

Dalam kajian terkait “ Pendidikan Multikultur dan Pendidikan Multiagama Melalui Pembelajaran Sejarah”, terdapat tiga subbahasan, yaitu *pertama*, kesadaran Multi kultural, yang membahas toleransi sosial terkait adanya multi bahasa, suku, budaya dan adat istiadat di Indonesia. *Kedua*, Kesadaran Multi Agama, yang membahas bahwa secara historis Bangsa Indonesia terdiri dari multi agama, sehingga generasi bangsa menyadai akan fakta historis tersebut. *Ketiga*, pengintegrasian materi multi kultural dan multi agama dalam pembelajaran sejarah tematik.

1. Kesadaran Multi Kultural di Indonesia

Keberadaan suatu bangsa adalah hasil dari perjalanan sejarah. Pada umumnya bangsa-bangsa memiliki faktor obyektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lainnya seperti persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, tradisi dan juga persamaan agama. Namun diantara faktor-faktor tersebut tidak ada yang bersifat mutlak dalam merumuskan suatu bangsa. Meski faktor obyektif tersebut penting namun yang paling utama adalah kemauan bersama secara nyata untuk hidup bersama. Kemauan inilah sebagai nasioanlisme (Kohn, 1984: 11-12).

Bierens de Haan mengemukakan bahwa negara adalah sebuah organisasi yang terdiri atas kesatuan-kesatuan masyarakat yang lahir karena kehendak tertentu. Adanya masyarakat sebagai kesatuan terjadi secara alami karena watak manusia sebagai makhluk sosial. Namun terbentuknya

negara terjadi tidak secara alamiah, tetapi karena adanya suatu kehendak yang didasari pemikiran-pemikiran tertentu. Kehendak dan pemikiran itu diwujudkan ke dalam suatu cita (*een idee*) yang dapat menjebatani kepentingan-kepentingan bersama dari kesatuan masyarakat tersebut. Pada hakekatnya, negara adalah peningkatan lebih tinggi dari ide yang berkembang dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang telah ada lebih dahulu sebelum mereka membentuk negara (Mahendra, 1996:4).

Struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri yang unik, *pertama*: secara horisontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam (Nasikun, 2005: 34). William Liddle dalam kajiannya tentang kepolitikan heterogenitas etnis di Indonesia, mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi di Indonesia. *Pertama*, pembelahan secara horisontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. *Kedua*, hambatan vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa, latar belakang pendidikan kekotaan dan tradisional atau pedesaan (Liddle, 1970: 4). Konsep “bangsa yang satu” yang dipopulerkan sejak Soekarno, yang pada masa Soeharto diterjemahkan melalui politik “*asas tunggal*” yang menekankan homogenitas masyarakat. Rakyat dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukkan demi cita-cita persatuan dan kesatuan (Abdullah, 2007: 65). Hal ini sebenarnya mengingkari keindonesiaan, karena pada dasarnya bangsa ini lahir karena adanya pluralistik.

Dalam masyarakat yang pluralis akan menganut pula ideologi yang bermacam-macam. Setiap masyarakat menunjukkan kemajemukan termasuk dalam pola pikir dan ideologi. Pada umumnya, suatu ideologi menjurus pada ide-ide politik yang lahir, berkembang dan dapat mempengaruhi peradapan suatu bangsa atau dunia. Ideologi merupakan bentuk pemikiran politik yang memberikan akses langsung untuk memahami bentuk dan sifat teori atau aplikasi politik. Ideologi-ideologi yang berkembang di dunia menciptakan kemajuan-kemajuan dalam semua kehidupan sekaligus juga ideologi sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan, disintegrasi bahkan perang. Persamaan ideologi melahirkan persamaan identitas sementara perbedaan ideologi sering menjadi sumber konflik antar masyarakat bahkan bangsa.

Ada tiga teori tentang hubungan dalam masyarakat majemuk, yaitu etnosentrisme, *melting pot* (peleburan), dan pluralisme. Etnosentrisme terjadi bila masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, dan menolak bercampur dengan kebudayaan lain. *Melting pot* adalah

peleburan komponen-komponen etnis ke dalam hanya satu identitas baru. Sementara pluralisme dimaksudkan bahwa masing-masing etnisitas tetap memegang identitas kelompoknya, tetapi beberapa hal ada identitas bersama (Kuntowijoyo ,1997:155).

Pluralisme dapat dipahami sebagai fenomena alami, karena manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, walau awalnya manusia diciptakan dari jenis yang sama (Syafi'i, 2002: 202). Kemajemukan agama-agama (pluralisme) dan budaya (multikulturalisme) sebagai tantangan besar yang dihadapi suatu bangsa dengan wilayah luas dan sejarah yang panjang seperti Indonesia. Menurut Furnivall, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*) adanya perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Masyarakat majemuk ini terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik (Furnivall dalam Nasikun, 2005: 34). Namun persepsi Furnivall tentang masyarakat majemuk di Indonesia terjadi saat masa Hindia Belanda, masyarakat yang tumbuh di atas sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing mempertahankan atau memelihara pola pikiran dan cara hidup mereka masing-masing (Furnivall dalam Nasikun, 2005: 37).

Keberadaan berbagai etnis dan tersebar di berbagai wilayah yang luas menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan di Indonesia sehingga terdapat kesulitan komunikasi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis juga menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal terkait sistem nilai, tingkah laku sosial, ekonomi, dan politik (Abdullah, 2007: 66). Keanekaragaman suku bangsa sebagai suatu kondisi dasar masyarakat plural memiliki implikasi sosial yang luas. Konflik yang lahir akibat keanekaragaman tersebut, telah menjadi ancaman bagi keamanan sosial dan kesejahteraan umum masyarakat (Abdullah, 2007: 84). Konflik ideologi dapat disimak dari hubungannya dengan perbedaan agama. Namun perbedaan agama bertemu dengan perbedaan suku-agama, maka konflik yang demikian terdapat juga di antara suku-bangsa (Nasikun, 2005: 86).

Pengertian masyarakat majemuk di Indonesia pada masa sekarang, berbeda dengan apa yang dituturkan Furnivall karena keadaannya sudah berbeda (Nasikun, 2005: 39). Sifat dasar masyarakat majemuk yang dikemukakan oleh van den Berghe, yakni: *Pertama*, segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan atau subkebudayaan yang berbeda.

Kedua, memiliki stuktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplemeniter. *Ketiga*, kurang mengembangkan konsensus nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. *Keempat*, secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok. *Kelima*, secara relatif integrasi sosial karena paksaan. *Keenam*, dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lain (van den Berghe dalam Nasikun, 2005: 63).

Kebudayaan di berbagai tempat di Indonesia tidak mendapat tempat yang layak dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk diekspresikan sehingga melahirkan berbagai akibat seperti separatisme, konflik sosial yang meluas, kredibilitas negara yang rendah, dan teror. Bhineka tunggal ika dibutuhkan untuk mengikat pluralisme budaya Indonesia, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya telah melahirkan akibat yang buruk (Abdullah, 2007: 63-64).

Untuk menjembatani permasalahan kemajemukan yang dibahas di atas tersebut, cara yang efektif untuk menimbulkan kesadaran sejarah melalui materi pembelajaran sejarah. Maksudnya, siswa dibawa ke dalam cakrawala historis yang kontekstual bahwa wilayah Indonesia yang luas, terdiri dari ribuan pulau, dengan sendirinya setiap wilayah tersebut mempunyai sosio historis masing-masing. Setiap daerah, mempunyai sejarah sosial dan sejarah budaya sendiri karena terkait dengan perjalanan sejarah masing-masing, termasuk interaksi dengan masyarakat dan budaya dari wilayah lain. Wilayah yang terisolir sehingga sulit melakukan akses dengan budaya lain, masyarakatnya cenderung mengembangkan kebudayaannya sendiri. Sedangkan masyarakat yang berinteraksi dengan budaya lain, maka akan terjadi asimilasi dan akulturasi. Secara historis, wilayah lain yang melakukan interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia adalah budaya India, budaya Islam (Persia, Gujarat, Arab, Mesir dan lainnya), budaya Tiongkok, budaya Barat serta pengaruh lain.

Setiap wilayah di Indonesia, mempunyai perbedaan terkait dinamika sosial-budaya, termasuk pengaruh budaya lain tersebut. Dari hal inilah, pada waktu tertentu terciptalah Indonesia yang multi kultural. Fakta sosio-historis dan kultur-historis yang demikian, jarang sekali dibahas dalam pembelajaran sejarah. Padahal, generasi bangsa perlu bukan sekedar paham tentang sejarah multi kultur bangsanya sendiri, namun perlunya kesadaran historis adanya fakta bahwa bangsa ini lahir dari adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut akhirnya disatukan dalam frame bangsa dan negara, bukan perbedaan yang dibeda-bedakan. Selama ini, perbedaan-perbedaan kultural di Indonesia, tampaknya tabu untuk diungkapkan secara detail dalam materi pembelajaran karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan antar pendukung

kebudayaan.

Meskipun sejarah tidak pernah berulang, namun pengalaman sejarah dapat digunakan untuk menghadapi krisis masa kini karena selalu ada persamaannya. Dengan perspektif sejarah kritis, masa kini dapat dipahami melalui perbandingan dengan krisis dalam masa lampau (Kartodirdjo, 1993:20). Selama ini, pembelajaran dari berbagai jenjang di Indonesia, lebih mengutamakan aspek kognitif, dibanding afektif. Untuk itu, dalam desain materi pembelajaran, perlu mencermati permasalahan ataupun potensi permasalahan suatu bangsa untuk masa sekarang dan masa yang akan datang agar proses pembelajaran lebih bermakna. Untuk itu, mungkin kita perlu mencermati permasalahan serupa di negara lain sebagai pembanding. Sebagai contoh, suatu waktu dalam kurikulum sekolah dasar di Inggris, mencantumkan tema tentang Afrika dan Asia untuk disampaikan kepada para siswa. Pembahasan tema tersebut tidak terbatas hanya permasalahan geografis, namun juga antropologi, sejarah, kultur dan sosiologi. Pemerintah Inggris menyadari bahwa sebagai negara besar dengan jumlah wilayah jajahan yang banyak, maka dimungkinkan akan ada imigrasi dari berbagai negara. Tema tentang Asia dan Afrika sebagai upaya membentuk sebuah kesadaran dari generasi bangsanya untuk menghindari atau mengurangi sikap diskriminasi dari pribumi kepada bangsa pendatang lainnya. Jika kita perhatikan dalam dunia sepak bola, Liga Inggris termasuk liga di Eropa yang pelecahan kasus rasial terhadap pemain bola dari benua lain terbilang minim. Hal ini sebagai contoh tidak langsung adanya keberhasilan pembelajaran dengan tema yang kontekstual sebagai mana yang dimaksud.

2. Kesadaran Multi Agama di Indonesia

Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata "Tolerare" yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Ihsan, 2009:24-25). Secara harfiah kata 'Toleran' bermakna sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan,) seseorang yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun kata 'toleransi' bermakna sikap atau sifat toleran. Modal dasar memupuk sikap toleransi antarsesama dalam kehidupan sosial (Rosyid, 2016 : 76). Menurut Wasino (2006:35) hubungan yang terjalin antar umat beragama dalam suatu wilayah tertentu mengakibatkan mereka melakukan kontak dan interaksi sosial.

Gordon Allport (1954) menyebutkan tentang paradoks agama dan intoleransi. Menurutnya, agama turut bertanggung jawab atas munculnya prasangka. Kendati ada aspek universal dari setiap agama, tapi ketika ikatan-ikatan keagamaan itu terbentuk, maka perasaan in group akan muncul dan menyebabkan setiap orang yang berada di luar ikatan tersebut dianggap sebagai out group dan diperlakukan berbeda, bahkan tidak jarang dicurigai akan mengganggu ketahanan ikatan tersebut. Dalam konteks inilah, konflik dan perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi rentan muncul.

Pluralitas agama di satu sisi memiliki potensi untuk konflik, secara antar dan intern agama, namun di sisi lain mempunyai potensi untuk integrasi. Hal ini sangat tergantung dari sudut pandang suatu agama diartikan dan dimaknai. Terdapat beberapa pendekatan di dalam memahami agama, antara lain: teologis normatif, antropologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis (Abuddin Nata dalam Syafi'i, 2002: 202). Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan keyakinan sebetulnya telah banyak memberikan sumbangsih besar bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Akan tetapi, karena pengetahuan dan kedewasaan masyarakat yang kurang mengenal toleransi, persoalan agama justru kerap menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal (Wach, 1971:35). Hendropuspito, (1986: 32) mengemukakan bahwa paling tidak ada empat hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu: perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku-ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, masalah mayoritas-minoritas golongan agama.

Perpecahan masyarakat dapat timbul karena penolakan terhadap pandangan hidup lama atau berbeda dengan agama. Perpecahan akan muncul jika klaim agama yang memutlakkan agamanya, dan sering diekspresikan tanpa kompromi (Syafi'i, 2002: 202). Masyarakat Indonesia termasuk yang rawan akan terjadinya konflik sosial atas nama agama. Padahal, faktanya pemeluk agama di Indonesia termasuk kategori multi-agama. Jika demikian, potensi konflik vertikal dan horizontal menjadi sangat rentan untuk terjadi lagi. Untuk itu, perlu adanya pembiasaan dalam membahas perbedaan agama di Indonesia. Materi sejarah yang membahas sejarah muncul dan berkembangnya nilai-nilai religi dan agama-agama di Indonesia, akan memberi kesadaran sejarah.

Berdasarkan fakta sosio-historis, sebelum Nusantara bersentuhan dengan pengaruh dari luar, masyarakat Indonesia telah mengenal nilai religius yang bersifat universal yakni animisme-dinamisme. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan bangunan jaman neolitikum dan megalitikum, berupa menhir, kubur batu, punden berundak serta bangunan suci prasejarah lainnya.

Berakhirnya prasejarah di Nusantara ditandai dengan adanya bukti pengaruh Hindu dari India di Kalimantan, selanjutnya muncul pengaruh agama-agama lain dari peradapan lain di dunia. Sebenarnya animisme-dinamisme bukanlah suatu unsur asli budaya lokal suatu wilayah atau bangsa. Hampir di tiap sejarah perjalanan umat manusia di semua benua atau bangsa, terdapat kepercayaan animisme dan dinamisme sebagai bagian dinamika kebudayaan bangsa. Dalam teori kebudayaan terdapat generalisasi dalam ilmu kebudayaan bahwa suatu bangsa akan mengalami tingkat religi dari kepercayaan yang paling primitif yaitu animisme-dinamisme, kemudian mengalami kemajuan menjadi ke arah konsep monotheisme.

Munculnya agama-agama di Nusantara seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katholik, dan juga Khonghucu setelah ada jalinan hubungan dengan dunia luar. Hal ini diawali jalinan interaksi dengan India sehingga muncul *penghinduan*. Menurut Soekmono, pemakaian istilah *Penghinduan* sering kali digunakan untuk menyebut pengaruh India di Nusantara. Namun sebenarnya istilah tersebut kurang tepat karena dua alasan yaitu (1) akulturasi kebudayaan di Nusantara tidak hanya dengan Hindu namun juga pengaruh agama Budha (2) agama Hindu dan Budha memiliki perbedaan yang nyata terkait tentang ajaran-ajarannya (Soekmono,1959;7). Namun demikian di Indonesia, pemakaian istilah Hindu untuk menunjukkan pengaruh Hindu dan Budha tetap sulit dihindarkan dan terpaksa digunakan (Hall, 1970:12).

Pengaruh Islam datang di fase selanjutnya. Di daerah-daerah yang belum mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-Budha, agama Islam mempunyai pengaruh yang mendalam dalam kehidupan penduduknya seperti daerah Sumatra, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, di daerah-daerah yang pengaruh Hindu kuat, maka terjadi adaptasi antara budaya Islam dan Hindu. Pengelompokan masyarakat muslim oleh Clifford Geertz menjadi abangan dan santri memperlihatkan corak situasi keislaman masyarakat Jawa yang berakulturasi dengan Hindu (Suratno, 2003: 24) (Koentjaraningrat,1980: 25) (Muchtarom, 2002: 11).

Pengaruh Islam ini akhirnya paling dominan di Indonesia karena didukung faktor sosio-politik dengan munculnya kerajaan atau kasultanan di Nusantara. Hal ini berpengaruh secara religius-sosiologis, sehingga banyak masyarakat Indonesia memeluk agama Islam sebagai keyakinan atau budaya. Ketika abad XVI, muncul pengaruh Barat dengan semangat imperialsime-kolonialisme yang bersamaan muncul penyebaran agama Kristen dan Katholik. Di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, agama tersebut dominan. Agama Nasrani tersebut juga menjadi bagian dari dinamika perjalanan sejarah bangsa.. Di antara fase-fase pengaruh India, Timur

Tengah, dan Barat di Nusantara juga menjalin hubungan perdagangan dengan Cina, bahkan pada akhirnya banyak penduduk Cina yang menetap di Nusantara. Menurut Koentjaraningrat, perdagangan tingkat menengah dan perantara dagang pada masa Hindia Belanda dikuasai orang Tionghoa yang mulai masuk pada abad- 17 dan ke-18 dalam jumlah yang banyak (Koentjaraningrat, 1980:29). Perkembangan penduduk Cina di Nusantara juga membawa pengaruh keyakinan agamanya sendiri yang dibawa dari negeri leluhurnya yakni agama Khonghucu.

Dengan demikian, berdasar perjalanan historis tersebut sangat wajar jika bangsa kita memiliki multi-agama yang hidup berdampingan. Multi-agama semacam ini bisa terjalin semangat toleransi jika masing masing pemeluknya mengembangkan semangat persatuan dalam perbedaan. Apalagi muncul kesadaran historis bahwa adanya multi-agama di wilayah Nusantara sebagai bagian dari perjalanan historis dan sejarah memang tidak dapat diputar ulang. Semangat toleransi dapat dikembangkan melalui kesadaran sejarah yang demikian.

Kesadaran Toleransi melalui Pembelajaran Sejarah Tematik

Sebagaimana fakta yang ada bahwa wilayah perairan Indonesia membentang dan memanjang dengan pulau-pulau di dalamnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa letak geografis Indonesia memungkinkan untuk melakukan interaksi budaya dengan peradaban dan budaya lain di dunia. Konsekuensi dari fakta tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, bangsa Indonesia mempunyai tingkat keberagaman atau kebhinekaan yang paling kompleks dibanding dengan bangsa lain. Namun permasalahannya yang timbul adalah, sering kali konflik sosial yang ada karena perbedaan-perbedaan tersebut. Padahal dalam rekaman sejarah di seluruh dunia, konflik yang disebabkan oleh perbedaan SARA, perlu penyelesaian yang gradual dan holistik.

Masa lalu dari masyarakat atau sejarah suatu bangsa, bukan merupakan sumber ilmiah sekaligus sumber konflik serta dendam antara generasi bangsa. Apalagi dalam masyarakat multikultural, di mana perbedaan suku, ras, agama, dan ideologi seperti di Indonesia, sering menjadi pemicu konflik (Setianto, 2012: 485). Solusi yang elegan dalam menghadapi potensi laten konflik tersebut melalui kesadaran bagi generasi bangsa. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan yang disatukan, bukan kesatuan yang dibeda-bedakan. Kesadaran tersebut dapat dicapai melalui jalur pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sartono Kartodirdjo, bahwa pendidikan selaku proses enkulturasi dalam rangka *nation-building* berarti

proses melembagakan nilai-nilai baik yang berupa warisan leluhur, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai nasionalisme kultural, maupun nilai-nilai ideologi negara (Kartodirdjo,1997: 133).

Peserta didik harus mampu menemukan nilai-nilai yang ada pada materi sejarah yang dipelajarinya dan mampu merekonstruksi hubungan antar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran sejarah tersebut, baik dalam konteks hubungan antar nilai-nilai yang terdapat dalam materi sejarah yang disampaikan secara parsial maupun hubungannya dengan nilai-nilai yang terjadi saat ini. Sebab pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya untuk diketahui, tetapi diharapkan dapat dipakai untuk memperbaiki usaha-usaha di masa mendatang (Barnadib,1973:45).

Berfokus pada fungsi pengajaran sejarah untuk meningkatkan proses penyadaran diri, maka dua aspek didaktik sejarah perlu ditonjolkan yaitu (1) segi teknik penyampaian atau metodenya dan (2) segi substansialnya atau silabus. Kedua aspek terdapat pengaruh timbal balik, keduanya bertalian dengan usia serta tingkat pendidikan anak didik. Prinsip pemilihan substansi dalam didaktif sejarah adalah (Kartodirdjo, 1993:254-257):

- 1) pendekatan secara lokosentris, mulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya
- 2) pendekatan konsentris, mulai lingkungan dekat meluas ke lingkup nasional terus ke yang internasional
- 3) temasentris yaitu pilihan tema tertentu yang menarik sekitar pahlawan atau monumen, dan lain sebagainya
- 4) kronologi: urutan kejadian menurut waktu
- 5) tingkatan presentasi dari deskriptif-naratif ke deskriptif-analitis, mulai dari cerita tentang “ bagaimana” terjadinya, sampai pada “mengapa”-nya
- 6) sejarah garis besar dan menyeluruh

Meski pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah terdiri dari berbagai macam tergantung tujuan dan muatan materinya sebagaimana pendapat Steele (dalam Isjoni, 2007: 98), yaitu : Pertama, model kronologis artinya model yang umum dalam pembelajaran sejarah dengan implementasi sejalan esensi pokok sejarah sebagai evolusi dan proses berkelanjutan. Kedua, model tematis adalah model pembelajaran sejarah untuk mengembangkan pengertian mendalam periode tertentu peristiwa sejarah, dilaksanakan dengan memilih tema-tema menarik, kontekstual, dan aktual dikaji secara interdisipliner dengan *multidimensional approach*. Ketiga yaitu model garis

perkembangan khusus adalah model yang berangkat dari perpaduan model kronologi dan tematis. Kronologis menjadi fokus utama dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu, unik dan strategis dari peristiwa sejarah. Model garis perkembangan khusus ini menelusuri beberapa aspek khusus yang menarik saja dalam kehidupan. *Keempat*, yaitu model *regresif*, kebalikan model garis besar kronologis, dengan memanfaatkan situasi sekarang sebagai langkah awal pengkajian sejarah. Permasalahan masa kini dikaji berdasarkan perspektif sejarah sebagai *background*.

Dari keempat model pembelajaran sejarah di atas, yang dianggap konvensional adalah model pembelajaran sejarah di Indonesia yakni model kronologis. Model ini yang menghasilkan pembelajaran kognitif-center dan cenderung membosankan bagi guru dan siswa karena bersifat hapalan materi fakta sejarah. Jika model kronologis bersifat demikian seharusnya kurikulum sejarah di Indonesia merubah dengan model lain. Dibanyak negara untuk pembelajaran sejarah sudah menggunakan pembelajaran model tematis dan bersifat nonnaratif.

Hubungan kurikulum pendidikan dikaitkan dengan permasalahan atau tantangan suatu bangsa, bisa dilihat dengan tinjauan historis model pengembangan kurikulum di Amerika Serikat dan Inggris. Khususnya ketika kedua negara tersebut mengidentifikasi tantangan dan permasalahan bangsa dikaitkan dengan pengembangan kurikulum, sehingga muncul mata pelajaran *social studies* di sekolah. Mata pelajaran *social studies* dimasukkan ke dalam sekolah di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Munculnya bidang studi tersebut dilatarbelakangi masalah sosiologis sebagai dampak sosial Revolusi Industri. Meski revolusi telah mengubah Inggris sebagai negara modern namun muncul aspek sosial yang mengkhawatirkan dengan adanya dekadensi masyarakat sebagai akibat konflik kepentingan kelas pengusaha-buruh. Melalui rancangan kurikulum berbasis afektif untuk menanggulangi dehumanisasi, dimunculkan mata pelajaran *social studies* di sekolah oleh Thomas Arnold. Harapannya para siswa mempelajari masalah interaksi manusia dalam masyarakat. Mata pelajaran baru tersebut dianggap berhasil menyatukan kembali masyarakat Inggris sehingga diadopsi oleh Amerika Serikat. Permasalahan yang berbeda namun tujuannya sama terjadi di Amerika Serikat karena hampir semua masyarakat Amerika berasal dari imigran Eropa, Asia, Afrika, dan negara-negara di sekitar benua Amerika sendiri yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan. Secara identitas, mereka belum merasa menjadi orang Amerika. Para pakar pendidikan berusaha menjadikan penduduknya sebagai bangsa Amerika. Salah satunya dalam bentuk desain kurikulum di abad ke-19 dengan memasukkan mata pelajaran *social studies*. Untuk menyusun kurikulum berkarakter tersebut,

pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1921 membentuk National Council for the Social Studies (NCSS), sebuah organisasi profesional yang secara khusus membina dan mengembangkan *Social Studies* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (Poerwito, 1992: 7).

Selama ini keanekaragaman dan kebhinekaan di Indonesia cenderung masih sebatas slogan dan konsep, bahkan perbedaan-perbedaan yang ada cenderung dibingkai “tabu” untuk dibahas. Jika hal ketabuan semacam ini dibiarkan maka permasalahan konflik sosial secara vertikal dan horisontal sebagai persoalan laten yang perlu diwaspadai. Konflik yang sebabkan SARA bahkan separatisme pada umumnya disebabkan sebagai dampak bahwa mereka merasa berbeda dengan lainnya. Perasaan perbedaan tersebut akan tereduksi jika generasi bangsa sudah dibiasakan untuk membahas dan mempelajari materi dari wilayah lain di Indonesia dalam hal budaya, geografis, sosiologis, antropologis, dan historisnya. Jika hal tersebut diterapkan maka mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan di antara mereka, namun perbedaan tersebut bukan untuk dibeda-bedakan, namun sebagai hal yang untuk disatukan sekaligus keunikan bangsa ini dibanding bangsa lain di dunia. Perbedaan-perbedaan tersebut jika sudah dibiasakan untuk dipahami dan disadari di antara elemen-elemen bangsa, pada akhirnya malah mereka merasa tidak berbeda. Jika perasaan ini sudah terwujud, maka Bhineka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan bangsa, namun sudah terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk pengintegrasian pembelajaran sejarah yang mengedepankan nilai-nilai multi kultur, jika dikaitkan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah di SMA dan SMK yang sekarang ini dalam Kurikulum 2013 memang tidak sinkron. Untuk itu perlunya pendekatan tematik dalam pembelajaran sejarah. Tema-tema yang dipilih tentunya bersifat kontekstual dan menjawab tantangan bangsa. Jika selama ini, salah satu tantangan bangsa yang besar adalah permasalahan multikultur dan multiagama yang menjadi sumber konflik sosial dalam masyarakat, maka perlu adanya pengimplementasian pendidikan multikultur dan multiagama dikaitkan dengan kesadaran sejarah. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia secara historis memang berbeda dalam hal suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Hal ini terjadi sebagai bagian dari dinamika sejarah bangsa. Wilayah Indonesia yang membentang dan memanjang, dan terdiri dari ribuan pulau, menjadikan Indonesia berbeda dengan bangsa dan negara lain di dunia.

Melalui pembelajaran sejarah tematis dengan tema multikultur dan multiagama, diharapkan muncul kesadaran dari generasi bangsa bahwa perbedaan sebagai fakta yang tidak bisa

dihindari, dan bukan kekuasaan manusia untuk menentukan perbedaan-perbedaan tersebut. Apalagi Tuhan memang telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun untuk saling mengenal. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang dibahas tersebut, bukan lagi menjadi sumber konflik sosial di Indonesia.

KESIMPULAN.

Kurikulum IPS ,Ilmu Sosial, dan PPKn di Indonesia perlu memperhatikan unsur yang bersifat kontekstual dan bersifat *problem oriented*. Materi dalam kurikulum, perlu dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kebangsaan dan kenegaraan, agar tujuan dari pendidikan nasional dapat dicapai melalui muatan kurikulum.

Permasalahan bangsa yang sering terjadi antara lain adanya konflik sosial dan gesekan di masyarakat yang disebabkan oleh SARA. Hal semacam ini, terus berulang dengan latar belakang yang bervariasi. Untuk itu, perlu adanya terobosan dalam penerapan kurikulum, termasuk dalam pembelajaran sejarah. Selama ini, pembelajaran sejarah bersifat konvensional dengan mengedepankan model kronologi. Model semacam ini, cenderung pada sejarah naratif untuk menghafal nama tokoh, nama tempat, kejadian dan sejenisnya. Nampaknya , hal semacam ini tidak membekas pada diri peserta didik.

Untuk itu perlu digunakan model sejarah tematis dengan tema-tema yang kontekstual dan dinamis. Jika permasalahan konflik sosial sering dikaitkan dengan masalah SARA, maka perlu adanya sejarah tematis yang membahas sejarah multikultur dan multiagama di Indonesia. Hal ini bertujuan agar ada kesadaran sejarah, bahwa bangsa ini yang secara geografis membentang dan memanjang, mempengaruhi dalam berinteraksi dengan berbagai budaya bangsa lain termasuk agamanya. Dengan demikian, masing masing wilayah di Indonesia mempunyai “sejarahnya sendiri” berupa kultur dan agama. Hal ini merupakan keunikan dan kekayaan bangsa yang harus tetap dihormati dan dijaga bersama

Daftar Rujukan

Allport, Gordon. 1954. *The Nature of Prejudice*. Cambridge, MA: Addison Wesley

Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Barnadib, Imam. 1973. *Dasar-Dasar Metode Sejarah Pendidikan* . Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta

- Hall,D.G.E. 1970. Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional
- Ihsan, Bakir. 2009. Menebar Toleransi Menyemai Harmoni. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kartodirdjo, Sartono. 1993.*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartodirdjo, Sartono.1997.” *Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah*” dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Hendropuspito, 1986.Sosiologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Kohn, Hans. 1984. *Nationalism, Its Meaning and History*. (Terjemahan: Sumantri Mertodipuro).Jakarta: Erlangga
- Koentjaraningrat.1980. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Kuntowijoyo.1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan
- Liddle, R. William. 1970. Ethnicity, Party and National Integration. New Haven dan London: Yale University Press
- Mahendra, Yusril Ihza.1999. Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Jakarta: Paramadina
- Muchtarom,Zaini.2002. Islam di Jawa dalam Perspektif Santri & Abangan. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah
- Nasikun.2005. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Poerwito. 1992. Ilmu Pengetahuan Sosial. Malang: Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang
- Rosyid, M.2015. Esai-Esai Toleransi. Yogyakarta: Tim Idea Press
- Sargent, Lyman Tower.1986. *Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Soekmono, R. 1959. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius
- Syafi'ie,Imam.2002. Fundamentalisme Agama, Masyarakat Plural dan Humanis. Yogyakarta (Jurnal Unisia No. 45/XXV/II/2002)

- Suratno, Siti Chamamah 2003. Agama dan Dialektika Pemerdayaan Budaya Islam-Nasional dalam kumpulan tulisan “Agama dan Pluralitas Budaya Lokal”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Setianto, Yudi. 2012. Dikotomi Bebas Nilai dan Nilai Pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 18, Nomor 4, Desember 2012. Halaman 477-488
- Wasino. 2006. Wong Jawa dan Wong Cina. Semarang: Unnes Press.
- Wach, Joachim. 1971. *Sociology of Religion*. Chicago and London: University of Chicago Press
- Widja, I Gde. 1989. *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.